

- ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (9) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 1982; PP No. 12 Tahun 2019; PP No.4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; PERPRES No.87 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.120 Tahun 2018; PERMENKEU No. 207/PMK.07/2018; PERMENKEU No. 208/PMK.07/2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMEN ESDM No.5 Tahun 2024; PERGUB JATIM No.2 Tahun 2022; Perda No.8 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Jenis Pajak dan masa Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, OPSEN, Tata cara penghapusan dan penonaktifan NPWPD, Nomor Registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, dan/ atau jenis penomoran lain yang dipersamakan, Pemeriksaan Pajak, Surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak, Penagihan Pajak, Kedaluwarsa, Penghapusan piutang Pajak, Keberatan, Banding, Gugatan Pajak, Insentif fiskal, Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, Kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data, Perforasi, Dokumen pemungutan Pajak, dan Tata cara pengenaan sanksi administrasi.
- CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2024.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 13 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 4 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - 227 Halaman.